

Received: 16 March 2026

Revised: 22 May 2026

Accepted: 1 June 2026

Peran Pemimpin Lokal dalam Mengelola Jaringan Pemangku Kepentingan pada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas

Dzikra Putri Lubna Yudanto^{1*}, Arie Surya Gutama², Wandu Adiansah³

¹⁻³Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

*dzikra22001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This study aims to describe the role of local leaders in the Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C), Indonesia, in managing stakeholder networks for disaster mitigation in Bojong Kulur village. This research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis as data collection techniques. The study involved six informants consisting of the KP2C community leader, the head of TPBDes, one of the neighborhood head (RW), and local community members. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing using the leadership role framework by London & Morfopoulos (2010). The findings reveal that local leaders within KP2C play a significant role in managing stakeholder networks through strategic communication with internal and external actors, local resource management, and relationship-building between the community and multiple stakeholders. These practices strengthen cross-sector coordination, enhance community preparedness, and support the development of a community-based flood mitigation system. The study highlights that effective stakeholder network management by local leaders is a key factor in strengthening community resilience to disaster.

Keywords: local leader, local leader's roles, stakeholder network management, community resilience.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemimpin lokal pada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) di Desa Bojong Kulur, dalam mengelola Jaringan pemangku kepentingan dalam mitigasi bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari enam informan, yaitu ketua KP2C, ketua TPBDes, salah satu ketua RW Desa Bojong Kulur, dan masyarakat Desa Bojong Kulur. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka teori peran pemimpin oleh London & Morfopoulos (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin lokal pada komunitas KP2C berperan dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan melalui komunikasi strategis dengan pihak internal dan eksternal, pengelolaan sumber daya lokal, serta pembangunan hubungan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait. Peran tersebut memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mendukung terbentuknya sistem mitigasi banjir. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan pemangku kepentingan oleh pemimpin lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan komunitas terhadap bencana.

Kata kunci: pemimpin lokal, peran pemimpin lokal, pengelolaan jaringan pemangku kepentingan, ketahanan komunitas.

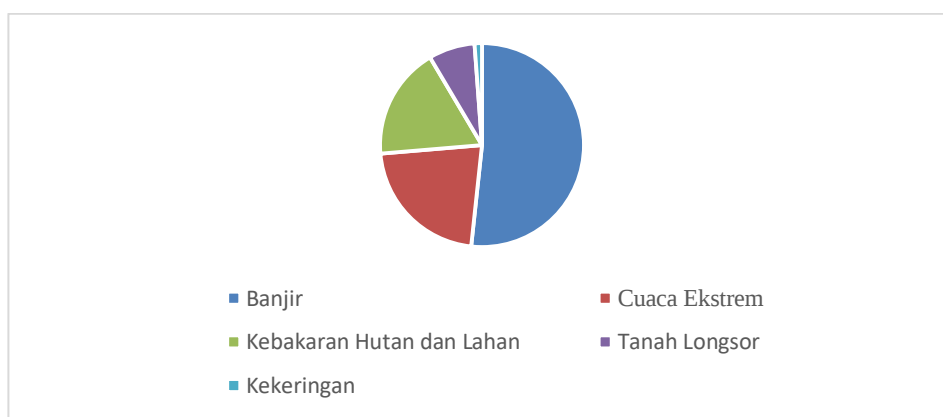
© 2026 Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (JSHP). This work is licensed under CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Kebencanaan merupakan salah satu permasalahan struktural yang dihadapi Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografis dan geologis yang kompleks (Fariza & Handayani, 2022). Letak

Indonesia pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, serta karakteristik iklim tropis dan bentang alam yang beragam menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, baik geologin maupun hidrometeorologis. Kerentanan tersebut diperkuat oleh dinamika pembangunan, perubahan tata guna lahan, serta kapasitas pengelolaan risiko bencana yang belum merata di setiap daerah (Harijoko et al., 2021). Dalam hal ini, bencana hidrometeorologis menjadi bencana yang dominan terjadi di Indonesia, dengan banjir sebagai bencana yang paling sering terjadi (Setiawan, 2021).

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2025, terdapat 3.116 kejadian bencana di Indonesia, dengan didominasi oleh bencana banjir sebanyak 1.584 kejadian (BNPB, 2025). Tingginya frekuensi kejadian banjir menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah terjadi fenomena berulang yang berkaitan erat dengan degradasi lingkungan, perubahan tata ulang, serta rendahnya kapasitas mitigasi di tingkat lokal (Pratama et al., 2022). Besarnya angka kejadian bencana banjir memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar (Puspitotanti et al., 2021). Selain itu, banjir juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, fasilitas publik, seperti sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, perkantoran dan pemukiman warga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa banjir berimplikasi langsung pada terganggunya layanan dasar masyarakat serta panjangnya proses pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas (Wirdatul et al., 2025).



Gambar 1. Grafik Kebencanaan di Indonesia tahun 2025
Sumber: BNPB (2025)

Kerentanan banjir di Indonesia juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan tata kelola wilayah (Yusuf Katili et al., 2025). Secara nasional terdapat sekitar 24 juta hektar lahan kritis yang mengancam keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS), di sisi lain kemampuan pemulihan lingkungan rata-rata hanya mencapai 1,66% per tahun. Di Jawa Barat, terdapat 41 DAS yang berada dalam kondisi kritis (Pratama et al., 2022). Kondisi tersebut menjadikan wilayah hilir sangat rentan terhadap banjir. Dalam hal ini, perlunya ada penguatan mitigasi bencana bagi masyarakat yang berada dalam wilayah yang rentan. Keterlibatan masyarakat tidak lagi dapat diposisikan sebagai pihak yang terdampak saja, melainkan juga sebagai subjek aktif yang memiliki pengetahuan lokal, kapasitas lokal, dan sumber daya kolektif untuk menghadapi ancaman banjir sebagai bentuk mitigasi (Herdiansyah et al., 2020). Dalam hal ini, diperlukan adanya figur yang mampu mengoordinasikan, mengarahkan, dan menjembatani masyarakat dengan berbagai

kepentingan yang ada (Fakhriadi et al., 2025). Salah satu pihak yang dapat melaksanakan peran tersebut adalah pemimpin lokal.

Pemimpin lokal mempunyai peran yang strategis dalam mitigasi bencana karena kedekatannya dengan masyarakat, legitimasi sosial yang dimilikinya, serta kemampuannya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat pada saat terjadinya keadaan darurat (Rani et al., 2023). Pemimpin lokal merupakan individu yang berasal dari masyarakat dengan pengaruh dalam menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (Fitriyah, 2024). Pemimpin lokal kerap menjadi aktor utama yang mengambil tindakan ketika bencana terjadi, bahkan sebelum lembaga formal hadir, sehingga efektivitas respons komunitas sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan di tingkat masyarakat (Ade et al., 2024).

Pemimpin lokal berperan penting dalam pengurangan risiko bencana, termasuk peran sebagai penggerak perubahan sosial dan penyedia informasi bagi masyarakat. Menurut London & Morfopoulos (2010), terdapat empat peran pemimpin, yaitu peran pemimpin transformasional, peran pemimpin dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan, peran pemimpin dalam membentuk kerja sama tim, dan peran pemimpin dalam mengelola perubahan masyarakat. Dari keempat peran tersebut, penelitian ini berfokus pada peran pemimpin lokal dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan. Fokus ini dipilih karena berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas komunitas KP2C dalam upaya mitigasi bencana dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin lokal dalam membangun dan mengelola hubungan dengan berbagai aktor.

Penelitian mengenai peran pemimpin lokal dalam mengelola pemangku kepentingan, telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Okazaki et al. (2020); Ruslanjari et al. (2024) mendefinisikan bahwa pengelolaan jaringan pemangku kepentingan merupakan pelibatan pemangku kepentingan dalam berbagai proses di dalam sebuah lembaga seperti pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kapasitas pengetahuan melalui komunikasi satu arah, diskusi dua arah, musyawarah, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen sebagai bentuk kontribusi dalam modal sosial, finansial, pengetahuan, keahlian, dan manusia, sehingga pemimpin lokal menjadi kunci dalam keberlanjutan komunitas siaga bencana melalui koordinasi antar warga dan pemerintah desa.

Lalu, menurut Bahrianoor (2021); Gisevius et al. (2025) pemimpin lokal tidak hanya berfungsi untuk mengorganisir aksi kolektif, tetapi juga menjadi penghubung antar jaringan sosial, yang dimana menghubungkan masyarakat dengan sumber daya eksternal yang secara signifikan meningkatkan kapasitas adaptif komunitas di tengah ancaman alam bersama sektor pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah, akademisi, maupun media. Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan upaya mitigasi dan adaptasi komunitas terhadap bencana dipengaruhi oleh pemimpin lokal dalam melaksanakan perannya di masyarakat melalui koordinasi, pengelolaan situasi, serta pengelolaan jaringan antar kepentingan, sehingga peran pemimpin lokal tersebut perlu untuk dimanfaatkan secara maksimal dalam keberfungsian di masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai peran pemimpin lokal dalam mitigasi bencana umumnya menekankan pada kemampuan pemimpin dalam memobilisasi masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, dan mengoordinasikan tindakan kolektif dalam menghadapi bencana. Namun, kajian tersebut masih terbatas dalam menjelaskan secara mendalam bagaimana pemimpin lokal mengelola Jaringan pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat. Padahal, kemampuan pemimpin lokal dalam membangun komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi factor penting dalam memperkuat kapasitas mitigasi bencana di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran pemimpin lokal dalam mengelola Jaringan pemangku kepentingan pada komunitas mitigasi

bencana berbasis masyarakat, khususnya pada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) di Desa Bojong Kulur, guna memahami bagaimana praktik pengelolaan jejaring tersebut berkontribusi terhadap penguatan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir.

Sebagai respon terhadap kerentanan yang ada terhadap banjir tersebut, salah satu masyarakat lokal berinisiasi untuk membentuk suatu komunitas mitigasi bencana, yaitu Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C), sebuah komunitas berbasis masyarakat yang berfokus pada mitigasi bencana di Desa Bojong Kulur. Komunitas tersebut membantu masyarakat Desa Bojong Kulur terkait tindakan preventif sebelum terjadinya bencana. Keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut tidak lepas dari peran pemimpin lokal di dalamnya. Pemimpin lokal yang dimaksud dalam artikel ini adalah Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) beserta Ketua TPBDes, dan Ketua RW 36 Desa Bojong Kulur karena memiliki peran dalam memberikan motivasi, mengorganisir masyarakat, dan menjadi penghubung antar pihak dalam melaksanakan kegiatan mitigasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pemimpin dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin lokal dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan yaitu upaya pemimpin lokal dalam melakukan komunikasi strategis dengan pihak internal dan eksternal, mengelola sumber daya, serta membangun hubungan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, terdiri dari masyarakat, pemerintah, swasta, dan akademisi dalam membangun integritas yang pada akhirnya bermanfaat untuk menciptakan sistem mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat melalui koordinasi dan komunikasi efektif.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemimpin lokal pada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) di Desa Bojong Kulur dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan. Melalui artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai para pemimpin lokal pada komunitas KP2C menjalankan perannya terkait pengelolaan jaringan pemangku dalam melakukan komunikasi strategis dengan pihak internal dan eksternal, mengelola sumber daya, serta membangun hubungan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, terdiri dari masyarakat, pemerintah, swasta, dan akademisi dalam membangun integritas pada komunitas mitigasi bencana KP2C di Desa Bojong Kulur.

2. Metodologi

Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana peran pemimpin lokal pada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) dalam mengidentifikasi dan mengelola jaringan pemangku kepentingan yang memengaruhi atau terpengaruh oleh tujuan kelompok pada komunitas mitigasi bencana KP2C di Desa Bojong Kulur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan peran pemimpin lokal dengan jaringan pemangku kepentingan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang merupakan tempat dimana komunitas KP2C berada dan menjalankan kegiatan-kegiatannya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan data bahwa Desa Bojong Kulur merupakan wilayah hilir yang diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Cileungsi dan Cikeas, yang memiliki resiko tinggi terdampak banjir dari hulu kedua sungai tersebut pada saat terjadinya kenaikan TMA sungai. Sehingga, diperlukan mitigasi bencana agar masyarakat desa lebih sigap dan meminimalisir resiko.

Penelitian ini berlangsung dari bulan November 2025 hingga Desember 2025. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam yang difokuskan pada ketua komunitas KP2C sebagai pemimpin lokal dan didukung oleh keterlibatan informan lain dalam aktivitas komunitas KP2C. Penelitian dilakukan melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara

observasi non-partisipatif, dan data skunder. Instrument penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi. Penelitian ini melibatkan enam informan yang divisualisasikan melalui tabel 1 berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

Inisial	Usia	Tingkat Pendidikan
P	57 tahun	D3
B	55 tahun	SLTA
H	52 tahun	S1
F	21 tahun	S1
FM	31 tahun	S1
AK	62 tahun	S1

Sumber: Olah Data Penelitian (2025).

Tabel 1 tersebut menunjukkan identitas informan terkait inisial beserta usia, tingkat pendidikan, dan perannya di Desa Bojong Kulur yang memiliki peran dalam memberikan informasi terkait peran pemimpin lokal pada komunitas KP2C.

Lalu, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang sudah ditentukan beserta dengan observasi non-partisipatif yang dilaksanakan terkait data pendukung, seperti aktivitas KP2C, studi dokumentasi dilakukan terhadap arsip komunitas, laporan kegiatan, dan materi komunikasi publik yang relevan. Setelah itu, data yang telah diperoleh kemudian dikelola dan dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mentranskripsikan hasil wawancara, Menyusun catatan observasi, dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian. Analisis difokuskan pada peran pemimpin lokal dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan dengan menggunakan teori peran pemimpin oleh London & Morfopoulos (2010) sebagai kerangka analitis, Lalu, untuk validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data, dan keabsahan data.

3. Hasil dan Pembahasan

Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C)

Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) merupakan komunitas mitigasi bencana berbasis masyarakat yang diinisiasikan oleh salah satu masyarakat Desa Bojong Kulur yang terdampak banjir, yaitu informan P (57 tahun). Komunitas ini berdiri dari tahun 2016 hingga sekarang yang telah membantu masyarakat Desa Bojong Kulur dalam menghadapi bencana, khususnya bencana banjir dengan memberikan informasi mitigasi bencana. Ketua KP2C membentuk komunitas ini atas dasar kekhawatirannya terkait TMA pada sungai Cileungsi dan Cikeas yang naik pada musim penghujan yang nantinya berpengaruh terhadap keadaan di hilir sungai dimana ketua KP2C berada.

Komunitas KP2C memiliki agenda mitigasi bencana banjir di Desa Bojong Kulur, seperti pemantauan TMA sungai Cileungsi-Cikeas, penyampaian informasi terkait banjir, penyebarluasan peringatan dini banjir kepada masyarakat melalui media komunikasi digital, serta edukasi kebencanaan kepada warga. Aktivitas tersebut dikoordinasikan secara langsung oleh pemimpin

KP2C yang berperan dalam mengatur alur informasi serta memastikan data yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat dan tepat waktu.

Selain menjalankan fungsi operasional mitigasi bencana, KP2C juga berperan sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan banjir di Desa Bojong Kulur. Pemimpin KP2C secara aktif membangun dan menjaga hubungan komunikasi dengan pemerintah desa, perangkat desa, TPBDes, BNPB, serta media guna memperkuat koordinasi dalam situasi bencana. Melalui pengelolaan jaringan pemangku kepentingan ini, KP2C mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan sumber daya yang dimiliki pihak eksternal, sehingga memperkuat posisi komunitas sebagai pihak lokal yang strategis dalam pengurangan risiko banjir.

Pemimpin lokal pada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C)

Dalam pengelolaan risiko banjir di Desa Bojong Kulur, keberadaan komunitas KP2C tidak dapat dilepaskan dari peran sejumlah pemimpin lokal yang menjalankan fungsi strategis dalam struktur komunitas maupun dalam jejaring kebencanaan desa. Pemimpin lokal dalam hal ini tidak hanya terbatas pada satu figure saja, melainkan juga melibatkan pihak pemimpin formal dan informal, serta berperan sebagai penggerak, penghubung, dan pengambil keputusan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, pada komunitas KP2C, terdapat tiga pemimpin lokal yang berperan, yaitu ketua KP2C, ketua TPBDes, serta ketua RW 36 di Desa Bojong Kulur.

1. Ketua Komunitas KP2C

Ketua KP2C berperan sebagai pemimpin utama komunitas yang mengoordinasikan seluruh aktivitas mitigasi dan penanggulangan banjir berbasis masyarakat. Peran ini mencakup perumusan arah gerak komunitas, pengelolaan jaringan pemangku kepentingan, serta fasilitasi komunikasi antara warga, relawan, dan pihak eksternal. Ketua KP2C juga berperan sebagai sumber informasi utama terkait kondisi sungai dan peringatan dini banjir, sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat di antara masyarakat desa.

Pada penelitian ini, ketua KP2C berperan sebagai pemimpin dengan legitimasi sosial yang terbentuk dari pengalaman empiris dan keterlibatan langsung dalam isu kebencanaan sejak tahun 2016. Kepemimpinannya berkembang melalui praktik pemantauan sungai, penyediaan data, serta advokasi kebijakan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Dalam hal ini, ketua KP2C berperan besar sebagai aktor penghubung yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah, sektor teknis, dan pihak swasta. Peran ini memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kebencanaan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan dan tindakan mitigasi di tingkat lokal.

2. Ketua TPBDes Desa Bojong Kulur

Ketua TPBDes Desa Bojong Kulur memiliki peran formal dalam struktur pemerintahan desa yang bertanggung jawab terhadap koordinasi kebencanaan di tingkat desa. Dalam hal ini, ketua TPBDes berperan sebagai penghubung antara komunitas KP2C dan sistem penanggulangan bencana pemerintah. Peran ini mencakup penyelarasan informasi dari KP2C dengan kebijakan dan prosedur TPBDes, pengoordinasian sumber daya, serta dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama komunitas.

Pada penelitian ini, ketua TPBDes Desa Bojong Kulur yang menjalankan fungsi kepemimpinan formal dalam sistem penanggulangan bencana desa. Peran ini memberikan kewenangan struktural dalam mengoordinasikan sumber daya desa, mengaktifkan mekanisme kesiapsiagaan, serta menyelaraskan kebijakan dan prosedur kebencanaan di tingkat lokal. Dalam relasinya dengan komunitas KP2C ketua TPBDes berperan sebagai simpul institusional yang

mengintegrasikan informasi ke dalam sistem TPBDes. Maka dari itu, peran ini membantu komunitas dalam berjejaring dengan pihak eksternal.

3. Ketua RW 36 Vila Nusa Indah, Desa Bojong Kulur

Ketua RW 36, Vila Nusa Indah, Desa Bojong Kulur berperan sebagai pemimpin lokal di tingkat lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat yang terdampak banjir. Posisi ini menjadikan ketua RW sebagai aktor kunci dalam mobilisasi warga, penyebaran informasi peringatan dini, serta pengorganisasian tindakan kolektif seperti evakuasi dan gotong royong pasca banjir. Dalam jejaring KP2C, peran ini berfungsi sebagai penghubung antara struktur komunitas dan warga, sehingga memperkuat efektivitas implementasi program mitigasi.

Pada penelitian ini, ketua RW 36 di Vila Nusa Indah, Desa Bojong Kulur berperan sebagai pemimpin lokal di tingkat lingkungan dengan kedekatan langsung terhadap masyarakat desa. Ketua RW 36 menjadi pihak perangkat desa yang berperan bersama ketua KP2C dalam melaksanakan perannya melalui komunitas KP2C, khususnya dalam hal kontribusi warga desa. Peran ketua RW 36 menunjukkan adanya kontribusi kepemimpinan di tingkat mikro dalam pengelolaan pemangku kepentingan, khususnya dalam menerjemahkan kebijakan dan informasi teknis menjadi tindakan nyata yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat.

Peran Pemimpin Lokal pada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C)

Dalam kerangka teori peran pemimpin oleh London & Morofopoulos (2010) keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian tujuan internal saja, tetapi oleh kemampuan pemimpinnya dalam mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian, ketua dari komunitas KP2C telah melaksanakan pengelolaan jaringan pemangku kepentingan yang melibatkan stakeholder internal, seperti pengurus komunitas, serta stakeholder eksternal, termasuk warga, pemerintah desa, TPBDes, BNPB, akademisi, dan organisasi nonpemerintah dalam pelaksanaan kegiatan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketua KP2C secara aktif menjalankan kegiatan pengelolaan jaringan pemangku kepentingan terkait kebutuhan komunitas, termasuk proses dalam melakukan komunikasi strategis dengan pihak internal dan eksternal, mengelola sumber daya lokal, serta membangun hubungan antara masyarakat dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

1. Proses pemimpin lokal dalam melakukan komunikasi strategis dengan pihak internal dan eksternal

Proses pemimpin lokal dalam melakukan komunikasi strategis ditunjukkan oleh peran ketua KP2C dalam mengelola arus informasi, koordinasi, dan hubungan kerja lintas pihak dalam upaya mitigasi bencana di Desa Bojong Kulur. Dalam konteks internal komunitas, ketua KP2C secara aktif membangun komunikasi melalui penyelenggaraan rapat pengurus yang dan koordinasi yang intens. Hal tersebut terlihat dari pernyataan yang diberikan oleh ketua KP2C yang menjelaskan bahwa:

“Untuk komunikasi internal bersama pengurus KP2C, kami mengadakan rapat pengurus secara rutin selama satu bulan dua kali supaya semua kegiatan terarah dan mengetahui rencana selanjutnya, apalagi pada saat musim hujan.” (Ketua KP2C)

Selanjutnya, dalam menjalankan komunikasi eksternal, ketua KP2C secara intensif berjejaring

dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat desa maupun lintas wilayah. Sejalan dengan Okazaki et al. (2020) pelibatan pemangku kepentingan dalam berbagai proses di dalam sebuah lembaga melalui komunikasi satu arah, diskusi dua arah, musyawarah, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen.

Namun, komunikasi eksternal dilakukan secara formal dan informal, tanpa jadwal baku. Ketua KP2C bekerja sama dengan pihak pemangku kepentingan, seperti masyarakat, TPBDes, Kepala Desa, Lurah, Camat, hingga pihak pengelola bendung dan wilayah hulu. Media komunikasi yang paling banyak dimanfaatkan dalam berjejaring adalah melalui WhatsApp yang memungkinkan komunikasi berjalan secara mudah, cepat, dan *real-time*.

“Komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya TPBDes Bojong Kulur, pihak desa, hingga petugas bendung sungai dilakukan secara rutin jika dibutuhkan, baik secara diskusi langsung atau melalui WhatsApp agar dapat lebih praktis.” (Ketua KP2C)

Koordinasi yang dilakukan ketua KP2C dilakukan secara meluas dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Bahkan, informasi yang diberikan oleh KP2C kerap dijadikan acuan oleh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan cepat terkait kondisi banjir. Hal tersebut sejalan dengan Bachtiar et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan jaringan pemangku kepentingan bergantung pada peran pemimpin dalam melakukan komunikasi strategis melalui kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Dalam mendukung komunikasi strategis tersebut, ketua RW 36 berperan sebagai penghubung operasional antara KP2C dan pemerintah desa. Ketua RW 36 bahwa komunikasi yang dibangun oleh ketua KP2C tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi juga terintegrasi ke dalam sistem data dan kebijakan di tingkat wilayah. Ketua RW 36 secara aktif menjaga kesinambungan komunikasi agar data kebencanaan yang dihimpun KP2C dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam perencanaan dan penanganan bencana.

“Karena intensitas komunikasi ketua KP2C yang tinggi, maka terjalin hubungan komunikasi yang baik antar KP2C dengan perangkat desa terkait Informasi kebencanaan, sehingga dapat dilakukan integrasi data ke tingkat lokal untuk disebarluaskan kembali ke masyarakat.” (Ketua RW 36, Vila Nusa Indah, Bojong Kulur)

Komunikasi yang meluas tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Salin & Koponen (2024) bahwa diperlukan adanya komunikasi untuk memberikan fokus pada tujuan dan membangun hubungan interpersonal. Pola komunikasi yang dibangun oleh ketua KP2C menggunakan pendekatan yang familiar, tidak otoriter, dan mengedepankan diskusi dua arah, sehingga memudahkan kolaborasi lintas pihak terjalin dengan baik.

Sementara itu, ketua TPBDes berperan sebagai penghubung administratif yang menjembatani KP2C dengan struktur birokrasi TPBDes yang lebih formal. Ketua TPBDes membantu menerjemahkan dan menghubungkan kebutuhan dan inisiatif KP2C ke dalam mekanisme birokrasi yang berlaku, sehingga kerja sama lintas sektor bersama pihak formal dapat terjalin lebih efektif. Hal tersebut menghasilkan kerja sama yang berkelanjutan, yang dimana beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tema kebencanaan akan melibatkan ketua KP2C sebagai aktor utama komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan oleh Stadtler et al. (2024) bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan solusi

bersama terhadap kompleksitas permasalahan sosial, termasuk upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Selain intensitas komunikasi, aspek keterbukaan dan transparansi juga menjadi ciri penting dalam proses komunikasi strategis yang dilakukan ketua KP2C. Sesuai dengan pendapat Subni (2024), bahwa pemimpin lokal berperan dalam memastikan adanya komunikasi terbuka dalam kelompok. Pada praktiknya, dalam menyampaikan tujuan kegiatan dan laporan keuangan komunitas, ketua KP2C menekankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Komunikasi yang dilakukan oleh ketua KP2C dalam menyampaikan Informasi dilakukan secara terbuka dan transparan, seperti pada laporan keuangan yang diberikan secara jelas ke masyarakat secara rutin melalui WhatsApp dan media sosial lainnya, seperti Instagram.” (Masyarakat Desa Bojong Kulur)

Transparansi ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap KP2C dan memperkuat legitimasi komunitas sebagai mitra dalam mitigasi bencana. Hasil dari komunikasi tersebut tercermin dalam terbangunnya koordinasi lintas pihak yang menghasilkan penyusunan rencana aksi bersama, baik untuk penanganan bencana saat darurat, pelestarian sungai, maupun upaya pencegahan banjir di Desa Bojong Kulur.

2. Proses pemimpin lokal dalam mengelola sumber daya lokal

Okazaki et al. (2020) menyatakan terkait pelibatan pemangku kepentingan dalam berbagai proses di sebuah lembaga, termasuk pengelolaan sumber daya. Hal tersebut dilakukan ketua KP2C dalam bentuk mengidentifikasi, memanfaatkan, dan mengintegrasikan berbagai potensi yang ada di Desa Bojong Kulur untuk mendukung agenda mitigasi bencana. Sumber daya utama yang dikelola adalah sungai itu sendiri, yang tidak hanya dipandang sebagai sumber risiko bencana, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Ketua KP2C secara konsisten menanamkan pemahaman bahwa sungai merupakan “halaman rumah” yang harus dijaga dan dicintai bersama. Melalui kerja sama dengan perangkat desa, sungai dimanfaatkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan komunitas, seperti diskusi sungai, edukasi kebencanaan, dan kegiatan susur sungai.



Gambar 2. Alih Fungsi Sungai
Sumber: Olah Data Peneliti (2026)

Selain sumber daya alam, ketua KP2C juga mengelola sumber daya relasional dengan memanfaatkan jaringan lintas sektor yang dimiliki KP2C. Hubungan baik dengan perangkat desa, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dimanfaatkan untuk mengakses berbagai program yang relevan dengan tujuan komunitas. Ketua KP2C secara aktif mengaitkan agenda KP2C dengan program-program pemerintah yang dapat mendukung pengurangan risiko bencana. Dalam hal pengaduan dan kebutuhan teknis, KP2C juga kerap berperan sebagai pihak yang memberikan rekomendasi resmi kepada pemerintah ataupun pihak terkait lainnya, sehingga suara masyarakat dapat tersalurkan secara lebih terstruktur. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Ramdhan et al. (2024), bahwa diperlukan komunikasi untuk memberikan fokus pada tujuan, membangun hubungan interpersonal, dan menyelesaikan masalah yang ada.

Dalam mendukung pengeolaan sumber daya tersebut, ketua RW 36 berperan aktif dalam memperkuat praktik kolaboratif di tingkat masyarakat. ketua RW 36 terlibat langsung dalam penggerak partisipasi warga agar pengelolaan sumber daya lokal tidak bergantung sepenuhnya pada figur pemimpin, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Upaya ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya lokal dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan pendapat dari Wahyudi et al. (2025) terkait peran pemimpin yang dapat memimpin proses perubahan dengan melibatkan berbagai pihak.

Selain itu, sumber daya manusia menjadi potensi besar lainnya yang dikelola oleh ketua KP2C yakni sekitar 41.000 anggota komunitas KP2C yang berasal dari warga Bojong Kulur dan sekitarnya. Ketua KP2C menjelaskan bahwa anggota komunitas berperan sebagai sumber Informasi di wilayahnya masing-masing.

“Saya juga memanfaatkan para anggota KP2C yang sudah tersebar dari berbagai daerah di Desa Bojong Kulur untuk secara langsung memberikan kabar aktual di wilayahnya masing-masing melalui media sosial kami, yaitu WhatsApp, Instagram, dan X.” (Ketua KP2C)

Selain dengan anggota komunitas, pengelolaan sumber daya manusia juga dilakukan melalui komunikasi intens dengan para pemimpin lokal di tingkat RT/RW, kepala dusun, kepala desa, lurah, hingga camat. Melalui jejaring ini, ketua KP2C memastikan bahwa warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pemangku kepentingan yang aktif dalam setiap kegiatan, sehingga tujuan komunitas dapat dicapai melalui kekuatan kolektif warga itu sendiri. Selaras dengan pendapat dari Sousa & Rocha (2019), bahwa pemimpin dapat memimpin proses perubahan dengan melibatkan masyarakat, serta memastikan tersedianya kebutuhan sumber daya dalam menunjang keberhasilan upaya perubahan tersebut.

3. Proses pemimpin lokal dalam membangun hubungan antara masyarakat dan pemangku kepentingan

Menurut Pararera et al. (2022), pengelolaan jaringan pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk dapat memahami kebutuhan serta harapan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap berbagai aktivitas di masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, ketua KP2C sebagai individu yang menghubungkan kepentingan warga dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi dalam membangun integritas terkait mitigasi bencana secara aktif memfasilitasi pertemuan dan kegiatan yang melibatkan masyarakat bersama pemangku kepentingan eksternal, seperti apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan bersama berbagai pihak pemangku kepentingan mulai dari pihak camat desa, fasilitas kesehatan desa, BPD, hingga karang taruna desa.

“Kami sering menyelenggarakan acara bersama masyarakat seperti apel kesiapsiagaan dan rapat penanggulangan bencana dengan melibatkan pihak eksternal seperti TPBDes, KP2C juga memfasilitasi pertemuan antara warga yang menjadi korban banjir untuk memberikan opininya untuk solusi kedepannya.” (Ketua KP2C)

Opini oleh masyarakat menjadi penting, sehingga seringkali dilaksanakan rapat penanggulangan bencana bersama KP2C dengan masyarakat dan perwakilan dari TPBDes. Selain itu, dilakukan juga forum diskusi pascabencana yang melibatkan KP2C, masyarakat, perwakilan perangkat desa serta pemerintah desa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi mereka secara langsung kepada pihak yang berwenang.

Menurut Subni (2024), pemimpin lokal berperan dalam memastikan adanya komunikasi terbuka dalam kelompok. Untuk membangun integritas hubungan, ketua KP2C mengedepankan mekanisme musyawarah dan keterbukaan. Hubungan antara KP2C dengan masyarakat diperkuat melalui rapat yang terbuka dengan melibatkan perwakilan dari warga setempat. Ketua KP2C berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Sehingga, dari kegiatan yang dilakukan dapat memperkuat rasa memiliki dan kepercayaan baik bagi masyarakat maupun dari pemangku kepentingan yang terlibat, karena proses yang dijalankan bersifat inklusif dan transparan.

Peran ketua TPBDes dalam aspek ini terlihat sebagai sebagai penghubung responsif antara kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Dalam situasi bencana ketua TPBDes bekerja sama dengan ketua KP2C untuk memastikan laporan dan kebutuhan warga dapat segera diteruskan kepada perangkat desa dan pihak terkait.

“Saat terjadi bencana, KP2C membantu menghubungkan warga dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jika warga membutuhkan evakuasi, ketua KP2C langsung menghubungi pihak terkait, seperti TPBDes untuk mengarahkan bantuan dan relawan.” (Ketua TPBDes)

Hubungan antar KP2C dengan TPBDes terjalin dengan baik, sehingga pada saat dibutuhkan, kedua pihak tersebut masing-masing memberikan bantuan. Di sisi lain, sistem peringatan dini yang dikembangkan melalui kerja sama KP2C dan TPBDes banyak bergantung pada informasi yang dihimpun oleh KP2C. ketika warga membutuhkan bantuan, seperti evakuasi atau logistik darurat, ketua KP2C segera mengoordinasikan ketua TPBDes untuk mengarahkan bantuan dan relawan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, ketua KP2C juga membangun kerja sama dengan pihak eksternal, khususnya akademisi dalam mendukung advokasi dan inovasi terkait mitigasi bencana. KP2C kerap menjadi mitra dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program KKN mahasiswa, yang hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan strategi mitigasi ke depan.

“Saya bersama KP2C mendapatkan bantuan alat untuk sistem peringatan dini dari pihak akademisi untuk pengembangan informasi di desa yang sangat berguna untuk masyarakat Desa Bojong Kulur.” (Ketua KP2C)

Informasi dan rekomendasi yang diperoleh dari kerja sama tersebut tidak berhenti pada ketua KP2C saja sebagai pelaksana, tetapi juga disebarluaskan kepada pemangku kepentingan lain agar

manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Bahkan, KP2C telah dijadikan sebagai contoh praktik mitigasi bencana berbasis masyarakat di tingkat nasional. Selaras dengan pernyataan oleh Herlina et al. (2022) yang menjelaskan bahwa pemimpin sebagai agen perubahan dengan kesadaran akan perlunya perubahan di suatu kondisi dalam komunitas maupun masyarakat dengan mengetahui pendekatan profesional dan strategis dalam perubahan tersebut.

Kerja sama dengan akademisi juga menghasilkan dukungan konkret berupa bantuan alat sistem peringatan dini. Bantuan ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun oleh ketua KP2C tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menghasilkan kontribusi nyata bagi penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Pada perspektif teori, kepercayaan dan legitimasi merupakan fondasi hubungan stakeholder yang berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ardani & Castrawijaya (2025), yang dimana dengan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan kohesi kelompok. Dengan demikian pengelolaan jaringan pemangku kepentingan oleh KP2C yang dilakukan oleh Ketua KP2C, Ketua RW 36, dan Ketua TPBDes tidak hanya mendukung pencapaian tujuan jangka pendek terkait penanggulangan banjir, tetapi juga memperkuat resiliensi komunitas di Desa Bojong Kulur melalui sinergi kepentingan dan kolaborasi multi-aktor.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran pemimpin lokal pada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan menemukan bahwa ketua komunitas KP2C bersama dengan Ketua TPBDes dan Ketua RW 36 menjadi pihak strategis dalam memperkuat efektivitas mitigasi bencana di Desa Bojong Kulur. Pemimpin lokal tidak hanya berfungsi sebagai koordinator internal komunitas, tetapi juga sebagai penghubung utama antara warga dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Pengelolaan jaringan pemangku kepentingan oleh pemimpin KP2C dilakukan melalui proses pelaksanaan komunikasi strategis dengan pihak internal dan eksternal, pengelolaan sumber daya lokal, serta pengelolaan hubungan antara masyarakat dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Praktik tersebut sejalan dengan teori peran pemimpin oleh London & Morfopolous (2010). Pemimpin lokal pada komunitas KP2C mampu menyeimbangkan kepentingan stakeholder internal dengan *stakeholder* eksternal melalui koordinasi rutin, fasilitasi pertemuan, dan transparansi informasi.

Berdasarkan fokus penelitian mengenai peran pemimpin lokal dalam mengelola jaringan pemangku kepentingan pada komunitas KP2C, aspek yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah terkait proses pemimpin lokal dalam membangun hubungan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk menciptakan integrasi. Pola komunikasi tersebut masih cenderung bersifat insidental dan belum sepenuhnya terlembagakan dalam mekanisme koordinasi rutin. Oleh karena itu, disarankan agar pemimpin KP2C menginisiasi penguatan sistem komunikasi lintas pemangku kepentingan yang terstruktur dan berkesinambungan untuk dapat mengembangkan integritas dengan masyarakat. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi rutin. Dalam jangka panjang, pengembangan aspek ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan KP2C serta mendukung keberlanjutan jejaring kebencanaan berbasis komunitas. Sehingga, peran pemimpin lokal dapat berjalan lebih optimal dan adaptif terhadap dinamika kebencanaan.

Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan lembaga kebencanaan sebagai pihak strategis untuk memberikan dukungan yang sistematis terhadap komunitas berbasis komunitas seperti KP2C, khususnya dalam memperkuat peran pemimpin lokal sebagai pengelola jaringan pemangku kepentingan. Bagi komunitas kebencanaan di wilayah lain,

model pengelolaan jaringan pemangku kepentingan yang diterapkan oleh komunitas KP2C dapat dijadikan rujukan praktik baik dalam mitigasi bencana berbasis komunitas. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pengembangan studi yang mengukur secara empiris tingkat salience stakeholder dan dampaknya terhadap efektivitas penanggulangan bencana.

6. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami sampaikan kepada Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) dan masyarakat Desa Bojong Kulur atas dukungan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Ade, M., Harahap, K., Amar, I., Yuliawati, R., & Citra, A. (2024). Pengaruh Pola Komunikasi dan Struktur Kekuasaan terhadap Pengelolaan Bencana Alam di Masyarakat Desa di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(01), 14–23. <https://doi.org/10.58812/sish.v2.i01>
- Ardani, B., & Castrawijaya, C. (2025). Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengembangan Lembaga Dakwah: Membangun Efektivitas, Inovasi, dan Keberlanjutan. 2(3), 199–219. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i3.1146>
- Bachtiar, A., Nanda Barizki, R., & Pranawukir, I. (2024). Strategi Komunikasi Efektif Dalam Menjalin Hubungan Baik dengan Stakeholder Korporat dan Politik. 11. <http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas>
- Fakhriadi, I. A., Surya Gutama, A., & Resnawaty, R. (2025). Peran Interpersonal Pemimpin Lokal di Kelompok Tani Mangrove Berkah Anugerah Desa Karangjaladri dalam Mitigasi Bencana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 65–72. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.91772>
- Fariza, A., & Handayani, B. L. (2022). *TINDAKAN STRUKTURAL MITIGASI BENCANA PEMERINTAH DI INDONESIA* (Vol. 11, Number 2).
- Fitriyah, R. D. (2024). Leadership and Social Harmony: Understanding the Leader's Role in Fostering Social Integration Within Coastal Islamic Communities. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2), 141–159. <https://doi.org/10.18326/mlt.v9i2.3065>
- Gisevius, K., Niesters, L. M., & Braun, B. (2025). The role of community leadership in building community adaptive capacity to coastal hazards – Insights from neighborhood networks in Semarang, Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 163, 103963. <https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2024.103963>
- Herdiansyah, H., Husein, S. I., Asrofani, F. W., Simamora, P. A. R., & Kholila, B. N. (2020). Disaster Awareness through Disaster Preparedness Education for Primary Schools. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 519(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/519/1/012016>
- Herlina, E., Tukiran, M., Yusnita, N., Tito Andrianto, M., & Pakuan, U. (2022). *PERAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN*.
- London, M., & Morfopoulos, R. G. (2010). *Social Entrepreneurship: How to Start Successful Corporate Social Responsibility and Community-Based Initiatives for Advocacy and Change*.
- Okazaki, S., Plangger, K., Roulet, T., & Menendez, H. (2020). *Okazaki_et_al_2020_holder_network_engagement_EJM*.
- Pararera, E., Hadi Purwanto, R., Budi Permadi, D., Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jln Agro, F., & No, B. (2022). *IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PERANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GUNUNG SIRIMAU, KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU IDENTIFICATION OF STAKEHOLDERS AND ROLES IN*

PROTECTED FOREST MANAGEMENT OF MOUNT SIRIMAU, AMBON CITY, MALUKU PROVINCE. <https://doi.org/10.30598.jhppk.2022.6.1.34>

- Pratama, D. N., Amanda, R. B., & Anitasyah, S. (2022). Kajian Struktural Fungsional: Fenomena Banjir sebagai Akibat dari Tidak Selarasnya Fungsi dan Sistem di Indonesia. *SOSIETAS*, 12(1), 65–74. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48072>
- Puspitotanti, E., Karmilah-177, M., Kerentanan, K., Terhadap, S., Banjir, B., & Karmilah, M. (2021). KAJIAN KERENTANAN SOSIAL TERHADAP BENCANA BANJIR. In *Jurnal Kajian Ruang* (Vol. 1, Number 2). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Ramadhan, A. S. S., Zulfikar, M., Hasanah, U., Agustin, D. I., & Pramudita, S. (2024). *omunikasi Interpersonal Dan Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Hubungan Dengan Pegawai Di Klinik Pelangi Bunda Medika.*
- Rani, A., Ain, Q., Hadi, A. P., Rofinus, A., & Teluma, L. (2023). *PERAN OPINION LEADER LOKAL DALAM KOMUNIKASI PUBLIK UNTUK MITIGASI BENCANA DI KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA THE ROLE OF LOCAL OPINION LEADERS IN PUBLIC COMMUNICATION FOR DISASTER MITIGATION IN THE PEMENANG SUB-DISTRICT OF NORTH LOMBOK DISTRICT.*
- Salin, L., & Koponen, J. (2024). Top managers' media selection and interaction goals in e-leadership. *Information Technology and People*, 37(8), 130–153. <https://doi.org/10.1108/ITP-06-2023-0533>
- Setiawan, D. (2021). Analisis Curah Hujan di Indonesia untuk Memetakan Daerah Potensi Banjir dan Tanah Longsor dengan Metode Cluster Fuzzy C-Means dan Singular Value Decomposition (SVD). *Engineering, MATHematics and Computer Science (EMACS) Journal*, 3(3), 115–120. <https://doi.org/10.21512/emacsjournal.v3i3.7428>
- Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Leadership styles and skills developed through game-based learning. *Journal of Business Research*, 94, 360–366. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.057>
- Stadtler, L., Seitanidi, M. M., Knight, H. H., Leigh, J., Clarke, A., Le Ber, M. J., Bogie, J., Brunese, P., Hustad, O., Krasonikolakis, I., Lioliou, E., MacDonald, A., Pinkse, J., & Sehgal, S. (2024). Cross-Sector Partnerships to Address Societal Grand Challenges: Systematizing Differences in Scholarly Analysis. In *Journal of Management Studies* (Vol. 61, Number 7, pp. 3327–3357). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/joms.13053>
- Subni, M. (2024). Peran Kepemimpinan dalam Membangun Tim Kerja dan Mengembangkan Organisasi The role of leadership in building teamwork and developing organizations. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 4(1), 15–26. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v4i1.2779>
- Wahyudi, I., Sindo, P., Hasri, S., Sohiron, S., Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (2025). Strategi Pemimpin Dalam Pengelolaan Perubahan Organisasi. *Journal of Islamic Education Management*, 11(1), 11–17. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare>
- Wirdatul, C., Hardianti, S., & Gustriana, E. (2025). Peran Edukasi Masyarakat dan Dampak Banjir terhadap Kesehatan Lingkungan serta Proses Belajar Anak SD di Desa Batu Belah, Kabupaten Kampar. <https://anthor.org/index.php/anthor>
- Yusuf Katili, A., Capacity dan Kerentanan Lingkungan Perkotaan, G., Capacity Dan Kerentanan Lingkungan Perkotaan, G., PERAN BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN BANJIR DAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BUGIS Andi Yusuf Katili, A. DI, Arifin, R., Mokodongan, R., Ilmu Administrasi Publik, P., & Bina Taruna Gorontalo, U. (2025). Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo. In *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM dan Ilmu Sosial (JAEIS)* (Vol. 4, Number 3).